



Kementerian PPN/  
Bappenas



OPEN  
GOVERNMENT  
INDONESIA



# **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA VII TAHUN 2023-2024 SEMESTER I TAHUN 2023**

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

✉ [sekretariat.ogi@bappenas.go.id](mailto:sekretariat.ogi@bappenas.go.id) |    @opengovindo |  Open Government Indonesia

Disusun oleh:

**Tim Sekretariat Nasional Open Government Indonesia**

**2023**

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>1</b>
<b>CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI VII 2023-2024: SEMESTER I .....</b>	<b>6</b>
<b>ISU STRATEGIS DAN KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024 .....</b>	<b>7</b>
<b>STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENYUSUNAN LAPORAN... 12</b>	
<b>DESKRIPSI CAPAIAN 15 KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024 .....</b>	<b>15</b>
Komitmen 1 .....	15
Komitmen 2 .....	24
Komitmen 3 .....	26
Komitmen 4 .....	28
Komitmen 5 .....	32
Komitmen 6 .....	34
Komitmen 7 .....	36
Komitmen 8 .....	38
Komitmen 9 .....	40
Komitmen 10 .....	43
Komitmen 11 .....	45
Komitmen 12 .....	52
Komitmen 13 .....	57
Komitmen 14 .....	61
Komitmen 15 .....	67

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Open Government Indonesia (OGI) merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif melalui keanggotaannya dalam Open Government Partnership (OGP). Inisiatif ini telah didorong pemerintah Indonesia sejak tahun 2011 atas dasar bahwa keterbukaan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta berperan dalam memberikan pelayanan lebih berkualitas dengan adanya partisipasi masyarakat dalam membentuk kebijakan yang mempengaruhi kesehariannya dan melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah. Hal ini tertuang secara konkret melalui Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) yang disusun setiap dua tahun sekali secara ko-kreasi antar pemerintah dan non-pemerintah sejak tahun 2011.



**Gambar 1. Launching RAN OGI VII Tahun 2023-2024**

Pada tahun 2023, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas secara resmi meluncurkan RAN OGI VII Tahun 2023-2024. RAN OGI VII Tahun 2023-2024 terdiri atas enam isu strategis, yaitu: 1) anti-korupsi dan anggaran, 2) pelayanan publik yang inklusif, 3) ruang kewargaan dan demokrasi, 4) akses terhadap keadilan, 5) kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), dan 6) energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Enam isu strategis tersebut terbagi dalam 15 komitmen, 37 ukuran keberhasilan dan 302 target capaian yang diimplementasikan oleh 21 Kementerian/Lembaga dan 18 Organisasi Masyarakat Sipil.

Untuk memastikan implementasi dari masing-masing komitmen dilakukan sesuai dengan target capaian yang telah disepakati secara ko-kreasi, Sekretariat Nasional OGI melakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali. Penilaian terbagi atas dua komponen, yakni komponen capaian administratif dan komponen proses ko-kreasi. Dokumen monitoring dan evaluasi yang diterbitkan per semester diharapkan dapat

menjadi bahan refleksi atas capaian yang telah dijalankan bersama dan juga masukan atas hal yang dapat diperbaiki untuk periode-periode berikutnya.

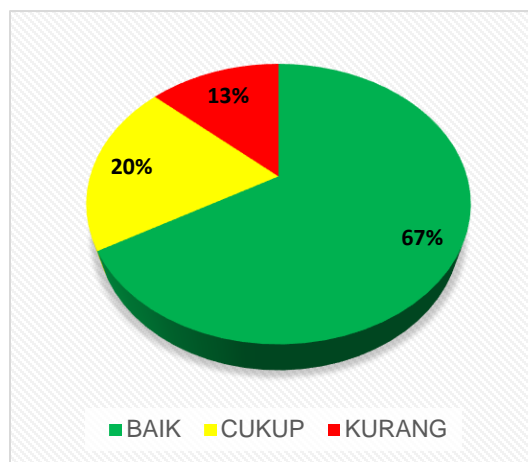
### Gambaran Umum Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023-2024 Semester I

Adapun gambaran umum dari temuan monitoring dan evaluasi Semester I RAN OGI VII Tahun 2023-2024 sebagai berikut:

#### 1. Capaian Administratif

Capaian administratif merupakan nilai dari hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target capaian. Adapun capaian administratif dalam pelaksanaan RAN OGI VII Tahun 2023-2024 Semester I sebagai berikut:

**Gambar 1.**  
**Capaian Administratif Pelaksanaan Semester I RAN OGI VII 2023-2024**



*Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2023*

- a. Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi, **67%** komitmen atau sejumlah **10** komitmen mendapatkan nilai baik yang menunjukkan target capaian telah terlaksana dengan baik. 10 komitmen tersebut antara lain, yakni:

**Tabel 1.**

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Baik

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 1	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komitmen 6	Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

<b>Komitmen 7</b>	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
<b>Komitmen 8</b>	Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa
<b>Komitmen 9</b>	Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
<b>Komitmen 10</b>	Terlaksananya Proses Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran bagi Korban Pelanggaran HAM
<b>Komitmen 11</b>	Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
<b>Komitmen 12</b>	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia
<b>Komitmen 13</b>	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia
<b>Komitmen 14</b>	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

- b. **20%** komitmen atau sejumlah **3** komitmen mendapatkan nilai cukup yang menunjukkan target capaian belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan membutuhkan penyelesaian lebih lanjut dari masing-masing *stakeholder* pelaksana. 3 komitmen tersebut, yakni:

**Tabel 2.**

Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Cukup

<b>Nomor Komitmen</b>	<b>Judul Komitmen</b>
<b>Komitmen 2</b>	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
<b>Komitmen 3</b>	Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

<b>Komitmen 4</b>	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
-------------------	--

- c. **13%** komitmen atau sejumlah **2** komitmen mendapatkan nilai kurang yang menunjukkan komitmen tidak dapat diselesaikan secara baik oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. 2 komitmen tersebut yakni:

**Tabel 3.**

Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Kurang

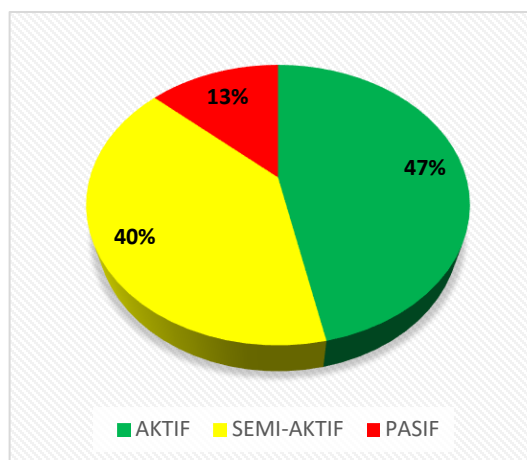
<b>Nomor Komitmen</b>	<b>Judul Komitmen</b>
<b>Komitmen 5</b>	Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi
<b>Komitmen 15</b>	Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang

## 2. Proses Ko-kreasi

Proses ko-kreasi merupakan penilaian hasil kerja sama maupun kolaborasi bermakna yang dibangun antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam mencapai target capaian. Temuan proses ko-kreasi pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024 pada Semester I adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.**

Proses Ko-kreasi Pelaksanaan Semester I – Semester IV RAN OGI VI 2020-2022



*Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2023*



- a. Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi, **47%** komitmen atau sejumlah **7** komitmen menunjukkan capaian ko-kreasi aktif, yang menunjukkan proses kolaborasi bermakna antara K/L dan OMS berjalan secara baik. **7** komitmen tersebut antara lain, yakni:

**Tabel 4.**

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Aktif

<b>Nomor Komitmen</b>	<b>Judul Komitmen</b>
<b>Komitmen 1</b>	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
<b>Komitmen 2</b>	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
<b>Komitmen 7</b>	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif
<b>Komitmen 10</b>	Terlaksananya Proses Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran bagi Korban Pelanggaran HAM
<b>Komitmen 11</b>	Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
<b>Komitmen 12</b>	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia
<b>Komitmen 13</b>	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia

- b. **40%** komitmen atau sejumlah **6** komitmen menunjukkan proses ko-kreasi semi-aktif, yang menunjukkan baik K/L maupun OMS belum sepenuhnya berkolaborasi secara optimal. **6** komitmen tersebut antara lain, yakni:

**Tabel 5.**

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Semi-Aktif

<b>Nomor Komitmen</b>	<b>Judul Komitmen</b>
<b>Komitmen 3</b>	Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup



<b>Komitmen 4</b>	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
<b>Komitmen 5</b>	Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi
<b>Komitmen 8</b>	Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa
<b>Komitmen 9</b>	Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
<b>Komitmen 14</b>	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

- c. **13%** komitmen atau sejumlah **2** komitmen menunjukkan proses ko-kreasi kurang, yang menunjukkan baik K/L maupun OMS belum berkolaborasi secara bermakna. Komitmen tersebut yakni:

**Tabel 6.**  
Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Pasif

<b>Nomor Komitmen</b>	<b>Judul Komitmen</b>
<b>Komitmen 6</b>	Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum
<b>Komitmen 15</b>	Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang

#### CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI VII 2023-2024: SEMESTER I

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024 yang dijalankan secara rutin per semester akan memberikan pembelajaran penting bagi aktor pelaksana, khususnya bagi Sekretariat Nasional OGI sebagai pihak yang melakukan pendampingan keberjalanan 2 (dua) tahun rencana aksi.

Berikut poin-poin refleksi dan rekomendasi tindak lanjut yang didapatkan selama pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024 pada Semester I:

### 1. Penguatan Proses Ko-kreasi antar Pemangku Kepentingan

Di dalam Monitoring dan Evaluasi B06 ditemukan bahwa proses ko-kreasi antar pemangku kepentingan belum terjalin aktif pada beberapa komitmen. Hal tersebut tidak terlepas dari belum dipahaminya urgensi proses ko-kreasi yang perlu dilaksanakan dalam pencapaian target-target dalam Rencana Aksi Nasional OGI.

### 2. Rendahnya Pelaporan para Pemangku Kepentingan

Berdasarkan data SISMONEV KSP dan SISMONEV OGI, terdapat 13 pihak yang terdiri atas 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dan 5 (lima) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang belum melaporkan Data Monitoring dan Evaluasi B06 RAN OGI VII dalam beberapa Target Capaian di B06. Beberapa kendala juga dialami saat tidak adanya *transfer knowledge* ketika terdapat pergantian PoC dari K/L dan OMS saat implementasi komitmen dijalankan.

### 3. Penguatan Komitmen Pemangku Kepentingan Pelaksana Aksi melalui Penguatan Regulasi

Berdasarkan penelaahan masih banyak pimpinan pada Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil yang belum secara utuh memahami komitmen aksi keterbukaan pemerintah di dalam RAN OGI yang telah menjadi tanggung jawab lembaganya. Hal ini ditengarai karena ketiadaan regulasi yang mengatur keterlibatan dan tanggung jawab pemangku kepentingan sebagai pelaksana aksi di dalam implementasi RAN OGI.

## ISU STRATEGIS DAN KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024

Dalam rangka mendorong implementasi nilai-nilai keterbukaan pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan OMS untuk melahirkan ide dan aksi praktik keterbukaan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Pemerintah/*Open Government Indonesia* (OGI) VII Tahun 2023-2024.

RAN OGI VII Tahun 2023-2024 mengangkat enam isu strategis, antara lain: 1) anti-korupsi dan anggaran; 2) pelayanan publik yang inklusif; 3) ruang kewargaan dan demokrasi; 4) akses terhadap keadilan; 5) kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial; dan 6) energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Tabel berikut menjelaskan 15 komitmen beserta Kementerian/Lembaga dan OMS pelaksananya:

**Tabel 7.**

Daftar Komitmen RAN OGI VII 2023-2024 beserta Pelaksananya

No.	Judul Komitmen	K/L dan OMS Pelaksana
	Anti-Korupsi dan Anggaran	

1.	Komitmen 1: Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</li> <li>2. Komisi Informasi Pusat (KIP)</li> <li>3. Indonesia Corruption Watch (ICW)</li> <li>4. Transparency International Indonesia (TII)</li> </ul>
2.	Komitmen 2: Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Kantor Staf Presiden RI</li> <li>3. PPATK</li> <li>4. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> <li>5. Stranas-PK</li> <li>6. Kementerian ESDM</li> <li>7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>8. Kementerian Pertanian</li> <li>9. Kementerian ATR/BPN</li> <li>10. Kementerian Keuangan</li> <li>11. Publish What you Pay (PWYP), TII, ICW</li> </ul>
<b>Ruang Kewargaan dan Demokrasi</b>		
3.	Komitmen 3: Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Kepolisian Republik Indonesia</li> <li>3. Auriga Nusantara</li> </ul>

4.	Komitmen 4: Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Yayasan TIFA
5.	Komitmen 5: Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dan Disinformasi	1. Badan Pengawas Pemilihan Umum 2. Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL)
6.	Komitmen 6: Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum	1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
<b>Pelayanan Publik yang Inklusif</b>		
7.	Komitmen 7: Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Suarise
8.	Komitmen 8: Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa	1. Kementerian Dalam Negeri 2. TII
9.	Komitmen 9: Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Wahana Visi Indonesia 3. TII
<b>Akses terhadap Keadilan</b>		
10.	Komitmen 10: Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk Memenuhi Hak Atas Kebenaran	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh
11.	Komitmen 11: Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia	1. Mahkamah Agung (MA) 2. Kejaksaan Agung

		3. Kepolisian Republik Indonesia 4. Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Asosiasi LBH APIK Indonesia
12.	Komitmen 12: Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia	1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM 2. MA 3. IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia
13.	Komitmen 13: Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia	1. BPHN 2. IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia
<b>Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)</b>		
14.	Komitmen 14: Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 3. Kementerian Hukum dan HAM 4. International NGO Forum on Indonesian Development, IJRS
<b>Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam</b>		
15.	Komitmen 15: Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang	1. Sekretariat Satu Data Indonesia 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>5. Indonesia Center for Environmental Law, Auriga Nusantara, PWYP, MediaLink</li> </ul>
--	--	--

## STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENYUSUNAN LAPORAN

### MEKANISME PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA DUKUNG RAN OGI VII 2023-2024

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan dua pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan RAN OGI secara ko-kreasi. Dalam pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024, terdapat 21 Kementerian/Lembaga dan 18 OMS yang memiliki sejumlah target capaian yang perlu untuk dilaksanakan dan dilaporkan setiap semesternya kepada Sekretariat Nasional OGI.

Pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan OMS diharapkan selaras dengan ukuran keberhasilan serta target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN OGI VII 2023-2024. Lebih dari itu, diharapkan, dalam pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut, Pemerintah bersama dengan OMS dapat mengerjakannya dengan mengedepankan proses ko-kreasi, sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil.

Memasuki periode pelaporan, Pemerintah dan OMS akan memberikan Data Dukung terkait pelaksanaan komitmen melalui dua kanal yang berbeda, yaitu:

1. SISMONEV Kantor Staf Presiden - bagi Kementerian/Lembaga
2. SISMONEV OGI - bagi OMS

### MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RAN OGI VII 2023-2024

Dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan, Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu dari proses tersebut yang perlu menjadi perhatian. Sekretariat Nasional OGI, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan keberjalanan implementasi, memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi RAN OGI VII 2023-2024. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan waktu Target Capaian, yaitu Semester I (B06), Semester II (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (B24). Hingga dokumen ini diterbitkan, Sekretariat Nasional OGI telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bagi Target Capaian Semester I. Adapun penjelasan terkait kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan akan dijelaskan pada bagian berikut.

#### 1. Pemantauan (*Monitoring*)

Sekretariat OGI bertugas untuk melaksanakan pemantauan (monitoring) secara intensif pada akhir semester berjalan dengan cara:

- a. Mempelajari laporan data dukung capaian target semester Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil;



- b. Melakukan konfirmasi apabila dinilai terdapat data dukung maupun hal-hal lainnya yang kurang jelas atau perlu dilengkapi oleh Kementerian Lembaga/ Organisasi Masyarakat Sipil.

Mekanisme pemantauan akan dijalankan oleh Sekretariat OGI sepanjang waktu target capaian berjalan, hingga pada periode monitoring dan evaluasi RAN OGI VII 2023-2024 setiap semesternya.

## **2. Evaluasi**

Sekretariat Nasional OGI melaksanakan evaluasi terhadap capaian target yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam memberikan penilaiannya, Sekretariat Nasional OGI tidak hanya melakukan penilaian secara administratif, tetapi juga kualitas pelaksanaan yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan rencana aksi yang dilaporkan memang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara ko-kreasi;
- b. Memastikan rencana aksi dilaksanakan dengan kualitas yang baik;
- c. Memastikan rencana aksi akan berkesinambungan;
- d. Memastikan para pelaksana menyadari bahwa rencana aksi membawa perubahan (*output-outcome*);
- e. Memastikan rencana aksi telah mencapai perubahan (*dampak/impact*) tidak hanya bagi pelaksana tapi juga penerima manfaat (masyarakat luas).

Selain itu, Sekretariat Nasional OGI melakukan analisis yang terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi capaian target, termasuk hambatan yang dialami oleh masing-masing komitmen, mulai dari Ukuran Keberhasilan, hingga Target Capaian masing-masing semester;
- b. Melakukan identifikasi Ko-kreasi serta Target Semester yang belum terselesaikan. Sekretariat OGI akan menganalisis kegiatan ko-kreasi yang dilakukan masing-masing pelaksana, serta meninjau kembali pelaksanaan target capaian yang tidak dapat diselesaikan pada periode sebelumnya

Proses Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023-2024 dilaksanakan Sekretariat Nasional OGI dengan penjelasan sebagai berikut:

### **a. Penilaian Capaian Administratif**

Salah satu komponen penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat OGI ialah penilaian Capaian Administratif. Penilaian ini bermakna untuk mengukur hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target capaian di dalam komitmen. Adapun kriteria penilaian pada bagian ini terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

**Tabel 8.**  
Skala Penilaian Capaian Administratif

Skala Nilai	Keterangan
70-100	Baik
51-69	Cukup
0-50	Kurang
N/A	<i>Not Available*</i>

\*Target tidak dapat diukur pelaksanaannya karena membutuhkan dukungan dari pelaksana lainnya

**b. Penilaian Proses Ko-kreasi**

Sebagai salah satu mandat dalam pelaksanaan RAN, Sekretariat OGI menjadikan Proses Ko-kreasi sebagai salah satu komponen penilaian. Komponen ini menjelaskan sejauh mana ko-kreasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan komitmen RAN OGI. Adapun kriteria penilaian proses ko-kreasi ialah sebagai berikut:

**Tabel 9.**  
Skala Penilaian Proses Ko-kreasi

	Aktif
	Semi-Aktif
	Pasif
	(N/A) Tidak bisa dilaksanakan, karena bergantung pada pelaksana lainnya

**c. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Penyusunan laporan yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional OGI setiap akhir semester memberikan penekanan maupun sorotan baik secara kualitatif dan kuantitatif terhadap dua hal, yakni:

- 1) Capaian Administratif;
- 2) Proses Ko-kreasi.

Selain itu, laporan Monitoring dan Evaluasi juga mengandung bagian Refleksi Implementasi sebagai acuan bagi pelaksana RAN.

Komitmen 1

**Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Publikasi Transaksi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog		
<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi bersama dengan masyarakat sipil	Rapat telah mendiskusikan terkait keterbukaan publikasi komponen informasi transaksi e-katalog antara lain berupa informasi perkembangan penayangan produk, komposisi jumlah produk berdasarkan jenis, detail transaksi e-purchasing dan unduhannya. Diskusi telah dilaksanakan di beberapa unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, juga bersama dengan masyarakat sipil, yakni ICW.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>	<b>Aktif</b>
	Secara keseluruhan, LKPP dan OMS telah menjalin ko-kreasi dan komunikasi yang baik, diskusi dengan masyarakat sipil dilaksanakan pada 15 Agustus 2023 setelah periode Monev B06 dan data dukung disampaikan melalui mekanisme pelengkapan laporan.	
<b>Indonesia Corruption Watch (ICW) &amp; Transparency International Indonesia (TII)</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
Adanya diskusi untuk menyepakati komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD di ekatalog	OMS telah melaksanakan diskusi dengan LKPP terkait Revisi Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa yang membahas mengenai risiko korupsi e-procurement, Daftar Inventaris Masalah (DIM) pengadaan versi masyarakat sipil, dan strategi advokasi kedepannya. Salah satu aspek dalam DIM RUU PBJ mencakup pengadaan darurat. OMS juga telah menuliskan dokumen yang berisikan argumentasi dan rekomendasi terhadap pengembangan sistem-sistem PBJ ke depannya.	

	Sayangnya, pembahasan penyepakatan komponen transaksi yang perlu dipublikasi K/L/PD di dalam e-katalog belum menjadi fokus pada diskusi tersebut.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Ko-kreasi OMS dengan LKPP secara keseluruhan dinilai baik, walaupun untuk Ukuran Keberhasilan 1 di B06 ini belum ada ko-kreasi dalam mencapai target penyepakatan komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD di e-katalog.	Aktif
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>  Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat		
<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</b>		
<b>Target B06:</b>  Pembahasan terkait komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan masyarakat sipil	<b>Capaian Target:</b>  Pengembangan dashboard pengadaan darurat saat ini sudah ada pada SPSE 4.5. Rapat koordinasi telah terlaksana antara Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP dengan Indonesia Corruption Watch dalam membahas komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Kegiatan pembahasan komponen informasi PBJ darurat dalam rapat koordinasi dilaksanakan secara ko-kreasi.	Aktif
<b>Indonesia Corruption Watch (ICW) &amp; Transparency International Indonesia (TII)</b>		
<b>Target B06:</b>  Pembahasan terkait komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard	<b>Capaian Target:</b>  TII telah melaksanakan diskusi dengan LKPP terkait Revisi Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa yang membahas mengenai risiko korupsi e-procurement, Daftar Inventaris Masalah (DIM) pengadaan versi masyarakat sipil, dan strategi advokasi kedepannya. Salah satu aspek dalam DIM RUU PBJ mencakup pengadaan darurat. ICW telah	<b>Nilai:100%</b>

LPSE dengan melibatkan masyarakat sipil	terlibat dalam diskusi mengenai informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat. Kelengkapan informasi dari sisi realisasi dibutuhkan untuk pengembangan dashboard pengadaan darurat. ICW akan menyusun kajian/rekomendasi terkait informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pengadaan darurat.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Ko-kreasi telah dilaksanakan antara OMS dengan LKPP melalui penyelenggaraan diskusi dan rapat koordinasi.	Aktif
<b>Ukuran Keberhasilan 3:</b> Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat		
<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</b>		
<b>Target B06:</b> Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	<b>Capaian Target:</b> Sampai dengan 31 Mei 2023, terdapat 83 Inspektorat K/L/PD yang telah bergabung dalam sistem e-pengaduan. Akan tetapi, pada April 2023 terdapat insiden keamanan informasi pada sistem e-pengaduan yang kemudian dilakukan pembahasan kendala antara Pusdatin LKPP, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, dan BSSN. Akibat adanya insiden tersebut, alternatif penyampaian pengaduan hingga saat ini masih dilakukan melalui persuratan lewat e-office LKPP.	Nilai: 100%
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Ko-kreasi tidak dapat dinilai dikarenakan OMS tidak memiliki capaian target untuk B06 pada Ukuran Keberhasilan 3 ini.	N/A
<b>Indonesia Corruption Watch (ICW)</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b> Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target

Tidak ada target B06	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak ada target	Tidak ada target
<b>Ukuran Keberhasilan 4:</b> Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka		
<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</b>		
<b>Target B06:</b> Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	<b>Capaian Target:</b> Telah dilakukan rapat pembahasan antara LKPP dan ICW pada 7 Juni 2023 yang membahas mengenai data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP. Publikasi komponen di SIKAP saat ini sudah terhubung dengan data Beneficial Ownership di Website BO.AHU.go.id, harapannya akan dapat ditampilkan riwayat penyedia yang memiliki daftar hitam/blacklist untuk pengadaan dan riwayat pekerjaan. Nama penyedia dan riwayat kemenangan tender menjadi salah satu data kinerja penyedia yang saat ini dapat dilihat publik tanpa perlu login. Apabila login dengan akun ppk akan dapat terlihat pula nilai yang diberikan terhadap penyedia.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Pembahasan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dilakukan secara ko-kreasi dengan mengundang OMS untuk mengidentifikasi komponen yang harus dipublikasi beserta alasan kepentingannya.	Aktif
<b>Indonesia Corruption Watch (ICW)</b>		
<b>Target B06:</b> Koordinasi dengan LKPP mengenai data kinerja penyedia yang akan terpublikasi di SIKAP.	<b>Capaian Target:</b> Koordinasi telah dilakukan untuk penyediaan data kinerja penyedia di SIKAP melalui rapat pembahasan di tanggal 7 Juni 2023. Beberapa hal yang menjadi review dari ICW mencakup data paket pekerjaan yang dimenangkan, data pelanggaran blacklist, nilai rupiah dan jumlah paket yang dimenangkan per tahun.	<b>Nilai: 100%</b>

	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Ko-kreasi dilaksanakan melalui keterlibatan ICW dalam rapat koordinasi yang diundang oleh LKPP.	Aktif
<b>Ukuran Keberhasilan 5:</b>  Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP		
<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</b>		
<b>Target B06:</b>  1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS  2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	<b>Capaian Target:</b>  Telah dilaksanakan rapat yang membahas mengenai mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama. Terkait mekanisme/bentuk kode unik yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang dalam satu objek program yang sama, kegiatan yang telah dilakukan oleh LKPP meliputi analisa belanja pemerintah dengan menggunakan kode unik berdasarkan kinerja realisasi PBJ K/L dan Pemda bukan kinerja perencanaan. Kode unik sedang tahap pengembangan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki SLIP, pada Februari lalu LKPP telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) namun jangka waktu beberapa dokumen DIK ada yang terlalu lama sehingga akan dimutakhirkan.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Proses ko-kreasi telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang memiliki muatan bahasan mengenai DIP & DIK serta pembahasan kode unik untuk menyatukan pekerjaan dalam proses pengadaan.	Aktif
<b>Indonesia Corruption Watch (ICW)</b>		
<b>Target B06:</b>  1. Adanya diskusi untuk	<b>Capaian Target:</b>  Diskusi telah dilaksanakan pada Juni 2023 sebagai bentuk awalan pembahasan mengenai daftar	<b>Nilai: 100%</b>



<p>menyepakati informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP</p> <p>2. Adanya diskusi terkait mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama</p>	<p>informasi publik yang dibuka, akan tetapi belum ada kesepakatan informasi apa yang akan dibuka sesuai Perki SLIP. Hal ini akan dikaji lebih lanjut oleh ICW. Pembahasan mengenai mekanisme dan bentuk kode unik juga menjadi salah satu poin diskusi yang usulannya akan diberikan pula argumentasi dan manfaatnya.</p>	
	<p><b>Proses Ko-kreasi:</b></p> <p>Ko-kreasi telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan ICW dan LKPP</p>	<b>Aktif</b>
<p><b>Ukuran Keberhasilan 6:</b></p> <p>Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>		
<p><b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</b></p>		
<p><b>Target B06:</b></p> <p>Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara LKPP dengan ICW dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam kegiatan Open Government Week 2023. Salah satu kegiatan yang akan didorong adalah peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa bekerja sama dengan ICW dan TII.</p>	<b>Nilai: 100%</b>
	<p><b>Proses Ko-kreasi:</b></p> <p>Pembahasan substansi MoU dan penandatanganan MoU dilaksanakan dengan ko-kreasi antara LKPP, ICW, dan IAPI.</p>	<b>Aktif</b>

Indonesia Corruption Watch (ICW)		
<b>Target B06:</b>  Pembahasan MoU antara LKPP dengan OMS	<b>Capaian Target:</b>  Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara LKPP dengan ICW dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam kegiatan Open Government Week 2023. Salah satu kegiatan yang akan didorong adalah peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa bekerja sama dengan ICW dan TII.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Pembahasan substansi MoU dan penandatanganan MoU dilaksanakan dengan ko-kreasi antara LKPP, ICW, dan IAPI.	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 7:</b>  Implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perki 1/2021		
KIP		
<b>Target B06:</b>  Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil	<b>Capaian Target:</b>  Telah dilaksanakan FGD yang mengundang OMS pada Februari 2023 terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Monev KIP, namun diskusi belum sepenuhnya membahas mengenai evaluasi terhadap indikator di Monev Keterbukaan Informasi Publik khususnya di pengadaan barang dan jasa.	<b>Nilai: 80%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan mengundang OMS pada FGD untuk evaluasi terkait pelaksanaan monev. Akan tetapi, monev dan indikatornya saat ini sudah diedarkan dan tidak bisa diubah sehingga pembahasan mengenai indikator pengadaan barang/jasa di monev keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sipil.	<b>Semi-Aktif</b>
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
<b>Target B06:</b>  Review Indikator Pengadaan	<b>Capaian Target:</b>  Mengikuti FGD yang dilaksanakan oleh KIP untuk evaluasi terhadap pelaksanaan monev keterbukaan	<b>Nilai: 80%</b>

Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil	<p>informasi publik pada Februari 2023.</p> <p><b>Proses Ko-kreasi:</b></p> <p>Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan mengundang berpartisipasi pada FGD untuk evaluasi terkait pelaksanaan monev. Akan tetapi, monev dan indikatornya saat ini sudah diedarkan dan tidak bisa diubah sehingga pembahasan mengenai indikator pengadaan barang/jasa di monev keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sipil.</p>	<b>Semi-Aktif</b>
<p><b>Tindak Lanjut B12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> OMS juga diharapkan dapat memberikan daftar terkait komponen informasi transaksi apa saja yang harus dipublikasi dalam e-katalog beserta alasan/argumentasinya.</li> <li><b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Setelah keterlibatan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh LKPP, OMS akan membuat kajian. Diharapkan untuk akselerasi pencapaian B12, di dalam kajian tersebut dijabarkan pula komponen informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ Darurat beserta urgensinya. Setelah itu, diharapkan kajian tersebut juga bisa menjadi dasar LKPP dalam pengembangan sistem kedepannya.</li> <li><b>Ukuran Keberhasilan 3:</b> Saat ini OMS sedang mencoba mencari dukungan dana baru untuk development API. OMS dapat melakukan pendampingan terhadap LKPP dalam hal integrasi inspektorat K/L/PD dalam e-pengaduan, LKPP dapat melakukan approach kepada OMS untuk menginformasikan tahapan integrasi yang akan dilakukan.</li> <li><b>Ukuran Keberhasilan 4:</b> ICW, TII, dan LKPP dapat melakukan pertemuan lanjutan yang membahas pengembangan database SIKAP.</li> <li><b>Ukuran Keberhasilan 5:</b> Rapat koordinasi dan pembahasan lanjutan diharapkan dapat dilaksanakan untuk pengembangan kode unik dan untuk memastikan informasi yang wajib dibuka dalam SPSE yang berkaitan dengan DIK dan DIP yang diatur LKPP dapat diperbaharui dasar hukum penetapannya.</li> <li><b>Ukuran Keberhasilan 6:</b> Penyelenggaraan peningkatan kompetensi pengawasan PBJ sudah ICW lakukan di Kupang dan Maros, harapannya dapat dilaksanakan dengan ko-kreasi LKPP pula di daerah lain.</li> <li><b>Ukuran Keberhasilan 7:</b> Indikator pengadaan barang dan jasa pada monev keterbukaan informasi publik diharapkan dapat direview secara mendalam dengan masyarakat sipil, walau sudah diedarkan harapannya review yang dilakukan bisa menjadi input untuk pelaksanaan monev di tahun berikutnya. Selain itu, ko-kreasi untuk mencapai target capaian antara KIP dan OMS diharapkan dapat dilakukan dengan memerhatikan nilai-nilai keterbukaan pemerintah.</li> </ol>		



## Komitmen 2

### Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership

<b>Ukuran Keberhasilan:</b>		
<b>Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership</b>		
<b>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK)</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 20%</b>
Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)	Berdasarkan laporan pelaksanaan Stranas PK pada Triwulan I Tahun 2023, telah teridentifikasi butir-butir penting yang perlu dilakukan revisi dalam Permenkumham No 21 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali BO.	
	Belum dilaksanakan review terkait dengan pembahasan pokok-pokok revisi dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>	<b>Aktif</b>
	Proses Ko-kreasi telah berjalan dengan baik antara KPK dengan Organisasi Masyarakat Sipil	
<b>Kantor Staf Presiden, PPATK, Kemenkumham</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
Laporan review Sectoral Risk Assessment (SRA) Data BO Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	Kementerian/Lembaga telah mengeluarkan Laporan Sectoral Risk Assessment Data BO	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>	<b>Aktif</b>
	Proses Ko-kreasi telah berjalan dengan baik antara KPK dengan Organisasi Masyarakat Sipil	
<b>Kementerian ESDM, KLHK, Kementan, Kementerian ATR/BPN, KemenKOP dan UKM, Kemendag, Kemenkumham, Stranas -PK, BKPM, OJK, LKPP, Kemenkeu</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 0%</b>

Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi		
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>	<b>Aktif</b>
<b>PWYP, ICW, dan Transparency International Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b> 1. Keterlibatan CSO dalam Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing - Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)  2. Penyusunan Kajian Kepatuhan Korporasi Dalam Deklarasi BO	<b>Capaian Target:</b> Organisasi Masyarakat Sipil telah terlibat dalam diskusi pembahasan butir-butir revisi Permenkumham terkait tata cara Verifikasi Data BO. OMS juga telah membuat laporan atau kajian terkait data BO korporasi dalam lingkup perusahaan sawit di Indonesia  <b>Proses Ko-kreasi:</b> Proses Ko-kreasi telah berjalan dengan baik antara KPK dengan Organisasi Masyarakat Sipil	<b>Nilai: 100%</b>  <b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b> Laporan Aksi BO diambil dari Laporan Triwulan 1 Stranas-PK.		

### Komitmen 3

#### Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan		
<b>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</b>		
<b>Target B06</b>  1. Memberikan masukan atas data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan yang merupakan basis data penyusunan outline kajian  2. FGD yang membahas mengenai ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	<b>Capaian Target:</b>  Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Pasif</b>
<b>Kepolisian Republik Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b>  Menerima data mengenai peristiwa yang dianggap sebagai ancaman terhadap pembela lingkungan	<b>Capaian Target:</b>  Kepolisian telah menerima data Auriga Nusantara mengenai peristiwa terkait ancaman terhadap pembela lingkungan dengan memberikan pula database dari tahun 2014 hingga April 2023 terdapat 107 kasus ancaman terhadap pembela lingkungan.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Kepolisian telah turut serta dalam menelaah data yang dihimpun Auriga dan memberikan rekap	<b>Aktif</b>



	database yang kemudian menjadi basis data yang ditampilkan di dalam sesi diskusi ancaman terhadap pembela lingkungan pada OG Week 2023. Kepolisian juga telah melakukan inisiatif ko-kreasi dengan menjadi narasumber dalam sesi diskusi tersebut.	
<b>Auriga Nusantara</b>		
<b>Target B06</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
1. Tersedianya masukan mengenai data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	Auriga telah melakukan ko-kreasi dengan mengundang Kepolisian dan Komnas HAM terlibat sebagai narasumber dalam sesi diskusi kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan. Rapat koordinasi juga dilaksanakan beberapa kali antar keduanya dalam pembahasan database ancaman terhadap pembela lingkungan dan outline terkait kajian kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan.	
2. Keterlibatan dalam FGD dan penyusunan outline kajian kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan pelibatan Kepolisian dan Komnas HAM dalam FGD yang diselenggarakan Auriga bersama Setnas OGI di OG Week 2023.	<b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b>		
Komnas HAM diharapkan dapat segera mengumpulkan data dukung, selain itu diharapkan pula terdapat kejelasan di biro bagian mana komitmen ini diampu. Audiensi telah dijalankan dengan Ketua Komnas HAM dan pertemuan lanjutan akan dilakukan dengan Biro Kerja Sama terlebih dahulu untuk mengetahui sejarah keterlibatan Komnas HAM dalam komitmen ini. Kedepannya, Setnas OGI akan membantu memfasilitasi pertemuan juga diharapkan setelah pertemuan dilaksanakan komitmen ini akan mendapat dukungan dari pimpinan Komnas HAM dan terdapat kejelasan di biro mana komitmen ini akan diampu. Setelah itu, penyusunan timeline kajian dapat dilakukan dan disepakati.		

## Komitmen 4

### Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L		
<b>Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>		
<b>Target B06</b>  Tidak ada target untuk periode B06.	<b>Capaian Target:</b>  Tidak ada target	<b>Nilai:</b>  <b>Tidak ada target</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>Yayasan TIFA</b>		
<b>Target B06:</b>  Tidak ada target untuk periode B06.	<b>Capaian Target:</b>  Tidak ada target	<b>Nilai:</b>  <b>Tidak ada target</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>		
Diterimanya Rekomendasi Peraturan Turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai Pengendali Data Gabungan dari Masyarakat Sipil		
<b>Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>		
<b>Target B06</b>  Keterlibatan dengan memberikan masukan atas kajian partisipatoris untuk proses	<b>Capaian Target:</b>  Telah memberikan masukan terhadap kajian partisipatoris yang dilakukan oleh Tifa terkait rekomendasi rancangan peraturan turunan pengendali data gabungan.	<b>Nilai:</b>  <b>70%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Ko-kreasi telah dilaksanakan antara Kominfo dengan Yayasan TIFA	<b>Aktif</b>

penyusunan rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan		
<b>Yayasan TIFA</b>		
<b>Target B06:</b> Penyelenggaraan penyusunan kajian partisipatoris untuk proses penyusunan rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	<b>Capaian Target:</b> Kajian partisipatoris telah disusun substansi rekomendasi ditujukan dalam konteks peraturan turunan pengendali data gabungan. Meskipun belum ada peraturan turunan dari UU PDP yang membahas mengenai pengendalian data pribadi, rekomendasi pengendali data pribadi disesuaikan dengan konteks Indonesia dalam UU PDP yang cukup terbatas.	Nilai: 100%
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Ko-kreasi telah dilaksanakan melalui keterlibatan Kominfo dalam penyusunan kajian partisipatoris yang TIFA lakukan.	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 3:</b> Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri		
<b>Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>		
<b>Target B06:</b> 1. Konsultasi publik untuk menjangkau masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peran lembaga PDP	<b>Capaian Target:</b> Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Pasif</b>

dalam pengaturan transfer data ke luar negeri terlaksana		
2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan		
<b>Yayasan TIFA</b>		
<b>Target B06:</b> Tidak ada target untuk periode B06.	<b>Capaian Target:</b> Tidak ada target	<b>Nilai:</b> <b>Tidak ada target</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 4:</b>  Keterlibatan dalam forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP		
<b>Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>		
<b>Target B06:</b> Tidak ada target untuk periode B06.	<b>Capaian Target:</b> Tidak ada target	<b>Nilai:</b> <b>Tidak ada target</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>Yayasan TIFA</b>		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya penjangkaran masukan dari kelompok	<b>Capaian Target:</b> Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Nilai: 0%</b>

masyarakat sipil dan sektor privat mengenai proses dan substansi peraturan pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
<b>Tindak Lanjut B12:</b> Kominfo dan TIFA diharapkan segera mengumpulkan data dukung untuk B06 yang belum terkumpul. Forum diskusi dan konsultasi publik mengenai RPP lembaga PDP dalam transfer data dan koordinasi dengan K/L dapat dilakukan dengan ko-kreasi antara TIFA dan Kominfo. Yayasan TIFA juga diharapkan dapat segera melaksanakan penjangkaran masukan dari masyarakat sipil dan swasta terkait proses dan substansi peraturan pelaksana UU PDP.		

## Komitmen 5

### Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Tersusunnya mekanisme penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilihan Umum		
<b>Badan Pengawasan Pemilihan Umum</b>		
<b>Target B06</b>  Adanya draft mekanisme penanganan panduan Disinformasi dalam Pemilu 2024	<b>Capaian Target:</b>  Bawaslu telah membuat mekanisme penanganan disinformasi Pemilu melalui platform "Jarimu Awasi Pemilu." Platform tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk melaporkan disinformasi terkait dengan Pemilu. Dalam melakukan verifikasi terkait disinformasi tersebut, Bawaslu juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Swasta (penyedia sosial media).	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Bawaslu telah melibatkan KOPEL untuk mendiskusikan terkait mekanisme penanganan disinformasi Pemilu.	<b>Aktif</b>
<b>Komite Pemantau Legislatif</b>		
<b>Target B06:</b>  - Audiensi untuk menyampaikan policy brief pentingnya panduan penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu  - Adanya poin-poin masukan untuk mekanisme	<b>Capaian Target:</b>  KOPEL telah melakukan Audiensi untuk menyampaikan Policy brief mengenai penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu. Audiensi sudah dilakukan kepada unit kerja terkait dengan staff ahli komisioner Bawaslu.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  KOPEL telah berinisiatif membangun Ko-kreasi dengan Bawaslu, dan upaya tersebut diterima baik Bawaslu dengan bentuk diadakannya Audiensi sebanyak dua kali antara KOPEL dan Bawaslu.	<b>Aktif</b>

penanganan pengaduan disinformasi		
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>  Pelaksanaan Forum Multistakeholder dalam penyusunan mekanisme penanganan pengaduan disinformasi		
<b>Badan Pengawasan Pemilihan Umum</b>		
<b>Target B06</b>  Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu	<b>Capaian Target:</b>  Bawaslu telah terlibat dalam Forum Multistakeholder yang diselenggarakan oleh KOPEL. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menerima usulan serta masukan dari OMS terkait mekanisme penanganan disinformasi Pemilu.  <b>Proses Ko-kreasi:</b> Bawaslu telah menerima rekomendasi dari KOPEL dan unsur OMS terkait dengan usulan proses atau mekanisme penanganan disinformasi Pemilu	<b>Nilai: 100%</b>  <b>Aktif</b>
<b>Komite Pemantau Legislatif</b>		
<b>Target B06:</b>  Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada draft mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	<b>Capaian Target:</b>  KOPEL telah memfasilitasi pertemuan untuk memberikan masukan dan draft penanganan kepada Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti masukan dari KOPEL.  <b>Proses Ko-kreasi:</b> Inisiatif Proses Ko-kreasi telah dilakukan oleh KOPEL dengan Bawaslu.	<b>Nilai: 100%</b>  <b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b>  Bawaslu dan KOPEL dapat segera melakukan penyusunan bersama mengenai regulasi serta mekanisme pengawasan yang dilaksanakan melalui Jarimu Awasi Pemilu.		



## Komitmen 6

### Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

<b>Ukuran Keberhasilan:</b>		
Tersedianya Data Pemilu dalam format data terbuka ( <i>open data</i> )		
<b>Komisi Pemilihan Umum (KPU)</b>		
<b>Target B06</b>  1. Tersedianya Data Profil Partai Politik Peserta Pemilu (SIPOL)  2. Tersedianya data peta daerah pemilihan dalam format data terbuka (SIDAPIL)	<b>Capaian Target:</b>  KPU telah membuka Informasi Partai Politik dan Informasi Peta Daerah Pemilihan (DAPIL). Portal tersebut dapat diakses oleh publik melalui portal info pemilu.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  KPU telah melakukan Ko-kreasi dengan Perludem terkait dengan jenis dan format data yang dibutuhkan terkait dengan SIPOL dan SIDAPIL 2024.	<b>Aktif</b>
<b>Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)</b>		
<b>Target B06:</b>  Terselenggaranya workshop dengan penyelenggara Pemilu dan Masyarakat Sipil untuk menyusun rekomendasi jenis-jenis data dalam setiap dataset Pemilu	<b>Capaian Target:</b>  Perludem telah melaksanakan workshop dengan OMS. Workshop dilakukan untuk menjangkau masukan terkait pentingnya keterbukaan data pemilihan umum serta tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum. Namun workshop belum dilakukan bersama dengan penyelenggara pemilu, sehingga masukan belum dapat diterima oleh penyelenggara Pemilu.	<b>Nilai: 80%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Proses Ko-kreasi antara KPU dan Perludem belum terlihat. Belum ada kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum.	<b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b>		
1. KPU telah mengunggah Data Daerah Pemilihan dan Informasi Partai Politik di portal <a href="http://www.opendata.kpu.go.id">www.opendata.kpu.go.id</a> yang terdiri atas data SIDAPIL dan SIPOL.		

Sekretariat OGI mengidentifikasi terdapat 5 Dataset terkait dengan SIDAPIL dan SIPOL untuk Pemilu 2024, apabila terdapat data yang belum dilengkapi, dapat terus dilengkapi sampai dengan Monev Semester 2 (B12).

2. Perludem belum menyelenggarakan kegiatan Workshop yang melibatkan penyelenggara Pemilu. Workshop akan diselenggarakan pada Oktober 2024, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama dengan KPU.
3. KPU diharapkan dapat mempersiapkan Data Terkait dengan Peserta Pemilu (Eksekutif dan Legislatif) dalam format data terbuka.

## Komitmen 7

### Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Tersusunnya pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital		
<b>Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>		
<b>Target B06</b> Merumuskan pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	<b>Capaian Target:</b> Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan perumusan Pedomann Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas melalui kegiatan pemetaan permasalahan dan gambaran singkat kondisi aksesibilitas digital di Indonesia.	<b>Nilai:100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Kominfo telah melakukan ko-kreasi secara Aktif bersama dengan Suarise untuk memastikan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemetaan permasalahan serta mendeskripsikan gambaran singkat kondisi aksesibilitas digital di Indonesia.	<b>Aktif</b>
<b>Suarise</b>		
<b>Target B06:</b> Melakukan penyusunan pemetaan permasalahan dan gambaran singkat terkait kondisi aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	<b>Capaian Target:</b> Suarise telah melakukan pemetaan mengenai permasalahan dan gambaran singkat terkait kondisi aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas.	<b>Nilai:100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Suarise dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan ko-kreasi melalui penyelenggaraan pemetaan permasalahan secara kolaboratif. Kedepannya diharapkan proses ko-kreasi dapat berlanjut sampai penyusunan kebijakan.	<b>Aktif</b>

**Tindak Lanjut B12:**

1. Kominfo diharapkan dapat meneruskan pembahasan dan penyusunan Pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas bersama dengan Suarise.
2. Suarise diharapkan mempersiapkan kajian terkait dengan identifikasi kebutuhan data, urgensi aksesibilitas digital, dan masukan untuk percepatan aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas.

## Komitmen 8

### Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Publikasi APBDes dan pertanggungjawaban APBDes melalui website desa		
<b>Kementerian Dalam Negeri</b>		
<b>Target B06</b>  Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa	<b>Capaian Target:</b>  Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi terkait dengan keuangan desa kepada aparatur desa. Selain itu Kementerian Dalam Negeri turut berpartisipasi dalam kegiatan penguatan transparansi pemerintah desa bersama dengan Transparency International Indonesia (TI Indonesia).	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Transparency International Indonesia telah berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi penguatan transparansi anggaran pemerintahan desa.	<b>Aktif</b>
<b>Transparency International Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b>  1. Pendampingan aparat desa dalam penguatan keterbukaan informasi publik  2. Peningkatan kapasitas aparat desa	<b>Capaian Target:</b>  TI Indonesia telah melakukan pendampingan kepada aparat desa berkaitan dengan penguatan keterbukaan informasi publik. Kegiatan dilakukan dalam bentuk webinar yang mengundang dan dihadiri oleh 15 perwakilan desa pilot project di Aceh, Jember, dan Kabupaten Kupang.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Kegiatan pendampingan kepada aparat desa dilakukan secara ko-kreasi oleh TI Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>		
Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa		

Kementerian Dalam Negeri		
<b>Target B06</b>  Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.	<b>Capaian Target:</b>  Tidak teridentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Kemendagri	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Tidak teridentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Kemendagri	<b>N/A</b>
Transparency International Indonesia		
<b>Target B06:</b>  Adanya kelompok masyarakat yang aktif mengawasi keuangan desa	<b>Capaian Target:</b>  TI Indonesia telah mendampingi 15 Desa di Jember, Kupang dan Aceh untuk membentuk kelompok masyarakat yang aktif untuk mengawasi keuangan desa. Kelompok masyarakat tersebut terdiri dari 45 Pemuda untuk 15 Desa di masing-masing wilayah. TI Indonesia juga telah melakukan pelatihan mengenai bagaimana cara atau proses mengawasi keuangan desa.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  TI Indonesia perlu melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan bentuk fasilitasi yang diperlukan, baik untuk Target Capaian Semester 1 dan Semester 2.	<b>Pasif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b>  1. TI Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri perlu mengadakan rapat koordinasi untuk merumuskan bentuk-bentuk fasilitasi yang diharapkan dan bisa dilakukan untuk masing-masing Ukuran Keberhasilan dan Target Capaian di Semester 1 dan Semester 2. 2. TI Indonesia dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Open Government Indonesia untuk pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau stakeholders terkait lainnya.		

## Komitmen 9

### Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Implementasi akuntabilitas sosial dalam proses musyawarah desa		
<b>Kemendes PDTT</b>		
<b>Target B06</b>  Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	<b>Capaian Target:</b>  Kementerian Desa PDTT telah melakukan sosialisasi terkait Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa melalui program-program Sekolah Lapang.  Kemendesa PDTT juga telah menerima audiensi WVI mengenai penyusunan kajian dan petunjuk teknis terkait dengan Musyawarah Desa.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Ko-kreasi dengan WVI belum terlihat. Namun sudah melakukan Ko-kreasi dengan OMS lain, seperti Lakpesdam dan Kemitraan . Kementerian Desa PDTT juga telah menerima audiensi WVI dalam rangka penyusunan kajian mengenai akuntabilitas sosial.	<b>Aktif</b>
<b>Wahana Visi Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b>  1. Tersedianya kajian & Juknis akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa.  2. Diadakannya dialog/diskusi publik mengenai akuntabilitas	<b>Capaian Target:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Wahana Visi Indonesia (WVI) telah melaksanakan audiensi dengan Kemendesa PDTT mengenai kajian dalam musyawarah desa. Berdasarkan hasil pertemuan, Kemendesa PDTT siap membantu dalam penyusunan kajian tersebut. Selain itu WVI juga telah menyusun draft kajian mengenai Musyawarah Desa. Petunjuk teknis akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa belum dilaksanakan dan disusun oleh WVI.</li> <li>WVI telah melakukan dialog dan diskusi mengenai musyawarah desa dengan</li> </ul>	<b>Nilai: 100%</b>

sosial dalam musyawarah desa	masyarakat desa di Kabupaten Ende, Ngada, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  WVI telah menyelenggarakan diskusi dengan Kementerian Desa PDTT dalam menyusun kajian dan juknis terkait akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa.	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>  Implementasi metode Program Review dalam proses pembangunan pemerintah di tingkat desa		
<b>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</b>		
<b>Target B06</b>  Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	<b>Capaian Target:</b>  Kemendesa PDTT telah melakukan sosialisasi terkait Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa melalui program-program Sekolah Lapang	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Belum terdapat Ko-kreasi antara Kemendesa PDTT dengan Yayasan TIFA karena tidak adanya pelibatan dalam kegiatan Program Review	<b>N/A</b>
<b>Yayasan TIFA</b>		
<b>Target B06:</b>  Tersedianya peraturan di tingkat desa yang mendukung dan mengesahkan pelaksanaan Program Review sebagai metode mendukung Akuntabilitas Sosial	<b>Capaian Target:</b>  Yayasan TIFA telah mendampingi Desa Sriharjo dan Desa Guwosari dalam menyusun Peraturan Desa mengenai Pelaksanaan Program Review pada kedua desa tersebut. Peraturan tersebut telah selesai disusun dan dipublikasikan	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Belum terlihat proses Ko-kreasi yang dilakukan Yayasan TIFA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.	<b>Pasif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b>		



1. Yayasan TIFA dan Wahana Visi Indonesia selaku lead pada setiap program dalam komitmen perlu melibatkan Kementerian Desa PDTT lebih aktif untuk memberikan masukan dalam program-program akuntabilitas sosial yang ada.
2. Yayasan TIFA perlu menyusun rincian terkait rangkaian persiapan yang dapat melibatkan Kemendesa lebih aktif.
3. Wahana Visi Indonesia diharapkan dapat segera menyelesaikan target penyusunan Kajian dan Petunjuk Teknis untuk memperbaiki hasil capaian di Semester 1
4. Wahana Visi Indonesia perlu menyusun rincian terkait peluang partisipasi dan kerja sama yang dapat dilakukan antara WVI dengan Kemendesa PDTT.

## Komitmen 10

### Terlaksananya Proses Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya Naskah Akademik (NA) RUU KKR sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu		
<b>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</b>		
<b>Target B06:</b> Tidak ada target untuk periode B06.	<b>Capaian Target:</b> Tidak ada target	<b>Nilai:</b> <b>Tidak ada target</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh</b>		
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Adanya <i>policy paper</i> mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk mendukung kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu		
<b>Target B06:</b> Adanya proses penyusunan <i>policy paper</i> dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan NA dan draf RUU KKR	<b>Capaian Target:</b> Telah dilakukan proses penyusunan <i>policy paper</i> “Usulan Pelembagaan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Membangun Mekanisme Pengungkapan Kebenaran untuk Pemulihan Korban”. Dokumen terdiri atas muatan mengenai prinsip-prinsip penghapusan impunitas, catatan dan refleksi kritis pelaksanaan di berbagai negara, dan usulan pembentukan	<b>Nilai: 100%</b>

	komite pengungkapan kebenaran dalam konteks Indonesia saat ini.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Kementerian/Lembaga, OMS dan masyarakat umum berdiskusi mengenai topik di kegiatan Open Government Week 2023, yang menjadi salah satu masukan untuk penulisan draf.	<b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b>  Perlu ada diskusi antar Kementerian/Lembaga dan OMS pelaksana mengenai waktu dan capaian komitmen agar sesuai dan relevan dengan dinamika pemulihan HAM berat di Indonesia yang sedang dijalankan Pemerintah.		

## Komitmen 11

### Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum		
<b>Kejaksaan Agung</b>		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya peluncuran pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan	<b>Capaian Target:</b> Pada 30 Mei 2023, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pedoman ini disusun secara ko-kreasi dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).  Rencana peluncuran pedoman telah didiskusikan, namun belum terlaksana. Pedoman telah direncanakan untuk diluncurkan pada 3 Agustus 2023.	<b>Nilai: 80%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Kejaksaan Agung telah berkolaborasi secara dekat dengan IJRS mulai dari proses penyusunan, penetapan, hingga diskusi untuk peluncuran Pedoman.	<b>Aktif</b>
<b>Indonesia Judicial Research Society</b>		

<p><b>Target B06:</b></p> <p>Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan berdasarkan masukan dari masyarakat sipil</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Pada 30 Mei 2023, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam prosesnya, masyarakat sipil (IJRS dan SIGAB) terlibat dalam memberi masukan dan asistensi dari keseluruhan proses, serta terlibat dalam persiapan peluncuran Pedoman. Peluncuran Pedoman terjadwalkan pada 3 Agustus 2023.</p>	<p><b>Nilai: 80%</b></p>
	<p><b>Proses Ko-kreasi:</b></p> <p>Kejaksaan Agung telah berkolaborasi secara dekat dengan IJRS mulai dari proses penyusunan, penetapan, hingga diskusi untuk peluncuran Pedoman.</p>	<p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Ukuran Keberhasilan 2:</b></p> <p>Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan</p>		
<p><b>Kejaksaan Agung</b></p>		
<p><b>Target B06:</b></p> <p>Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Belum ada diskusi tentang rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan, karena fokus kerja sama antar Kejaksaan Agung dan OMS saat ini masih terkait isu disabilitas dan asistensi terhadap peningkatan kapasitas jaksa untuk sensitivitas gender.</p> <p>Pada tanggal 10 Juli 2023, telah dilaksanakan pertemuan konsultatif isu</p>	<p><b>Nilai: 30%</b></p>

hukum di lembaga peradilan	strategis akses keadilan di mana ukuran keberhasilan ini baru dikomunikasikan antar pihak, namun belum ada diskusi mengenai teknis pelaksanaan dan tindak lanjutnya.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Sudah ada upaya mengomunikasikan rencana melaksanakan ukuran keberhasilan ini pada pertemuan konsultatif akses keadilan, namun belum secara substansial membahas mengenai capaian ukuran keberhasilan. Harapannya, pertemuan konsultatif atau rapat lainnya pasca periode B06 dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal agar dapat terlaksana pembahasan lebih substansial atas capaian.	<b>Semi-Aktif</b>
<b>Mahkamah Agung</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya diskusi awalan antara MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	<b>Capaian Target:</b> Mahkamah Agung dan OMS telah melakukan diskusi awalan mengenai latar belakang kegiatan monitoring dan evaluasi, kasus apa yang dapat dilakukan penilaian monitoring dan evaluasi, jenis data yang kira-kira dibutuhkan, dan tindak lanjut dari pertemuan.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Mahkamah Agung telah mengundang OMS dalam pertemuan pembahasan pada 6 Juli 2023 dan menghadiri rapat konsultatif kluster akses terhadap keadilan untuk pembahasan lanjutan pada 10 Juli 2023.	<b>Aktif</b>
<b>IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 51%</b>

<p>Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dan MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan</p>	<p>Dengan MA, OMS sudah melakukan diskusi awalan dengan Biro Perencanaan, dan akan dilakukan pertemuan dengan Pokja Perempuan dan Anak (Pokja PA) di mana IJRS tergabung di dalamnya pada Agustus 2023. Ke depannya, perlu ada komunikasi antar Biro Perencanaan, Pokja PA, dan OMS untuk melakukan sinkronisasi pembahasan dan strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi.</p> <p>Dengan Kejaksaan Agung, sudah ada upaya mengomunikasikan rencana melaksanakan ukuran keberhasilan ini pada pertemuan konsultatif akses keadilan, namun belum secara substansial membahas mengenai capaian ukuran keberhasilan.</p> <p>OMS juga telah membuat konsep alat ukur monitoring dan evaluasi, yang kedepannya akan dimintakan masukan kepada Pokja PA MA dan Kejaksaan.</p>	
	<p><b>Proses Ko-kreasi:</b></p> <p>OMS telah mengupayakan diskusi antar Kejaksaan dan MA, meskipun diskusi dengan Kejaksaan untuk Ukuran Keberhasilan 2 Semester B06 saat ini masih di tahap pemberitahuan mengenai kegiatan dan belum membahas capaian secara substansial.</p>	<p><b>Semi-Aktif</b></p>
<p><b>Ukuran Keberhasilan 3:</b></p> <p>Adanya evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan</p>		
<p><b>Kejaksaan Agung</b></p>		
<p><b>Target B06:</b></p>	<p><b>Capaian Target:</b></p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p>

Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Kejaksaan Agung telah memberikan tanggapan terhadap pemaparan kajian OMS pada pertemuan konsultatif isu strategis akses terhadap keadilan pada 10 Juli 2023.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Kejaksaan Agung telah memberikan tanggapan terhadap hasil kajian OMS dalam pertemuan konsultatif isu strategis akses terhadap keadilan.	Aktif
<b>Kepolisian Republik Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	<b>Capaian Target:</b> Kepolisian RI telah terlibat dalam pembahasan awalan kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan pada bulan Januari 2023.	Nilai: 100%
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Kepolisian RI telah terlibat dalam pembahasan yang diinisiasi oleh OMS.	Aktif
<b>Mahkamah Agung</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	<b>Capaian Target:</b> Mahkamah Agung telah menerima hasil kajian OMS dan memberikan tanggapan serta masukan atas kajian yang diterima.	Nilai: 100%
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Mahkamah Agung dan OMS telah menjalankan diskusi awalan terhadap hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan oleh Mahkamah Agung.	Aktif



IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
<b>Target B06:</b>  1. Adanya diseminasi hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan  2. Adanya diskusi awalan antara OMS dengan Kejaksaan, Kepolisian RI dan MA mengenai hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	<b>Capaian Target:</b>  OMS telah menyusun kajian berjudul "Kondisi Akses terhadap Keadilan untuk Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan Lain pada Masa Covid-19 di Indonesia", yang mencakup muatan mengenai implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan. Kajian ini lebih fokus terhadap Kepolisian RI dan Mahkamah Agung, namun juga memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan proses peradilan digital oleh APH secara keseluruhan, termasuk Jaksa.  Hasil kajian ini sudah diseminasikan dan telah ada diskusi awalan dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung pada rapat konsultatif di 10 Juli 2023, dan dengan Kepolisian secara terpisah pada bulan Januari.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Telah ada komunikasi antar pemangku kepentingan untuk pelaksanaan target capaian B06.	<b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b>  1. <b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Akan dilakukan peluncuran Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan oleh Kejaksaan Agung pada 3 Agustus 2023. Pasca peluncuran, Kejaksaan Agung dan IJRS perlu melakukan ko-kreasi untuk penyusunan materi sosialisasi di Kejaksaan.  2. <b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Perlu ada diskusi awalan antar Kejaksaan Agung dan OMS untuk membahas rencana monitoring dan evaluasi serta alat ukur yang dapat diterapkan. Sementara itu, dengan Mahkamah Agung, akan ada pertemuan lanjutan dengan Pokja Perempuan dan Anak (Pokja PA) pada Agustus 2023. Ke depannya, perlu ada komunikasi antar Biro Perencanaan		

Mahkamah Agung, Pokja PA, dan OMS untuk melakukan sinkronisasi pembahasan dan strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

3. **Ukuran Keberhasilan 3:** Untuk Mahkamah Agung dan Kepolisian, perlu ada diskusi lanjutan dengan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan berdasarkan temuan kajian OMS. Untuk Kejaksaan Agung, karena hasil kajian OMS belum fokus terhadap jaksa, perlu ada evaluasi apakah fokus kajian perlu dimodifikasi agar relevan dengan kegiatan Kejaksaan Agung (contoh: beralih ke kajian mengenai implementasi Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Akses Keadilan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Anak untuk mendukung proses peradilan bagi kelompok rentan, meskipun tidak fokus terhadap digitalisasi).

## Komitmen 12

### Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum		
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	<b>Capaian Target:</b> BPHN telah mengumpulkan data dukung berupa konsep Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum untuk bahan diskusi dengan OMS. Hal ini, beserta poin-poin yang BPHN ingin dapatkan masukan pada saat BPHN dan OMS nanti melakukan diskusi, telah dilaporkan dalam pertemuan konsultatif isu strategis akses terhadap keadilan pada tanggal 10 Juli 2023.  Namun, pada B06 belum ada diskusi teknis antar BPHN dan OMS untuk pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum. Laporan yang dikumpulkan BPHN sebagai data dukung juga menuliskan bahwa perlu ada pertemuan untuk mendiskusikan pencapaian target ini.	<b>Nilai: 50%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Ada upaya ko-kreasi melalui pertemuan konsultatif akses keadilan, di mana pada pertemuan tersebut ada pengantar mengenai perlu adanya diskusi untuk mencapai target ini. Namun, diskusi belum membahas mengenai capaian ukuran keberhasilan	<b>Semi-Aktif</b>

	secara substansial, sehingga mendapatkan nilai semi-aktif.	
<b>IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	<b>Capaian Target:</b> OMS belum mengumpulkan data dukung dan juga belum memberikan draf penyusunan Stopela maupun <i>pointers</i> dari hal-hal yang bisa dibahas dengan BPHN pada periode B06.	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Ada upaya ko-kreasi melalui pertemuan konsultatif akses keadilan, di mana pada pertemuan tersebut ada pengantar mengenai perlu adanya diskusi untuk mencapai target ini. Namun, diskusi belum membahas mengenai capaian ukuran keberhasilan secara substansial, sehingga mendapatkan nilai semi-aktif.	<b>Semi-Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum.		
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya diskusi awalan antara BPHN dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	<b>Capaian Target:</b> BPHN telah terlibat dalam diskusi awalan yang diselenggarakan OMS bersama dengan MA, dan memberikan informasi mengenai portal informasi yang ada di BPHN (Legal Smart Channel, Sidbankum), tantangan, dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat.	<b>Nilai: 100%</b>

	BPHN juga telah melakukan pertemuan virtual dengan masyarakat sipil pelaksana komitmen untuk membahas pelaksanaan komitmen.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> <p>Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.</p>	Aktif
<b>Mahkamah Agung</b>		
<b>Target B06:</b> <p>Adanya diskusi awalan antara MA dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum</p>	<b>Capaian Target:</b> <p>MA telah terlibat dalam diskusi awalan yang diselenggarakan OMS bersama dengan BPHN, dan memberikan informasi mengenai portal informasi yang ada di MA (Posbakum), tantangan dan praktik baik dari pelaksanaan, dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat.</p>	Nilai: 100%
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> <p>Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.</p>	Aktif

IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
<b>Target B06:</b>  Adanya diskusi awalan antara OMS dengan BPHN dan MA terkait rencana pemetaan kebutuhan bantuan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	<b>Capaian Target:</b>  Diskusi awalan telah dilakukan kepada MA dan BPHN untuk menjelaskan rencana kajian pemetaan kebutuhan terhadap informasi bantuan hukum di Mahkamah Agung dan BPHN. Diperoleh berbagai masukan terhadap rencana kajian termasuk temuan untuk menganalisa kebutuhan akan informasi bantuan hukum melalui portal yang ada (Posbakum, Legal Smart Channel, Sidbankum).  Selanjutnya OMS akan melanjutkan proses kajian dengan melakukan wawancara mendalam kepada BPHN dan MA untuk menganalisis lebih lanjut kebutuhan terhadap informasi bantuan hukum oleh masyarakat.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.	<b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b>  1. <b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> BPHN telah menyusun konsep Panduan Asistensi Penyusunan Stopela serta memetakan hal yang dapat dimintakan masukan dari OMS. Untuk periode berikutnya (B12), BPHN dan OMS perlu melakukan diskusi dalam rangka persiapan penyusunan draf yang ditargetkan untuk tersedia pada B18 RAN OGI VII Tahun 2023-2024. 2. <b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> OMS akan melakukan penyusunan kajian terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan		

hukum. Salah satu hal yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan yakni wawancara mendalam dengan BPHN dan MA.

## Komitmen 13

### Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai masukan untuk Rancangan UU Bantuan Hukum (RUU Bankum)		
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	<b>Capaian Target:</b> Pasca pemetaan kebutuhan kelompok rentan oleh OMS pada 2022 dengan “Legal Needs Survey”, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi lanjutan untuk usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan temuan survei, antara lain pada Open Government Week 2023 di tanggal 10 Mei 2023. Selain itu, temuan dari survei dan hasil diskusi telah disampaikan oleh BPHN dalam rapat perancangan Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum.  Selain itu, BPHN bersama dengan OMS pelaksana komitmen melakukan riset asesmen standar anggaran bantuan hukum dengan memetakan kebutuhan penerima bantuan hukum dari kelompok rentan dan biaya di luar biaya perkara yang kerap dikeluarkan pencari keadilan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi serta kunjungan lapangan di Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> BPHN dan OMS telah melakukan diskusi bersama untuk menindaklanjuti temuan mengenai kebutuhan hukum kelompok rentan serta kunjungan lapangan untuk	<b>Aktif</b>



	melakukan asesmen standar anggaran bantuan hukum.	
<b>IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b>  Adanya diskusi antara OMS dan BPHN terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	<b>Capaian Target:</b>  Pasca pemetaan kebutuhan kelompok rentan oleh OMS pada 2022 dengan “Legal Needs Survey”, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi lanjutan untuk usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan temuan survei, antara lain pada Open Government Week 2023 di tanggal 10 Mei 2023. Selain itu, OMS bersama BPHN melakukan koordinasi dan penyusunan ringkasan serta bahan yang dapat dibawa BPHN dalam pembahasan rapat lintas K/L untuk penyusunan RUU Bantuan Hukum.  Selain itu, BPHN bersama dengan OMS pelaksana komitmen melakukan riset asesmen standar anggaran bantuan hukum dengan memetakan kebutuhan penerima bantuan hukum dari kelompok rentan dan biaya di luar biaya perkara yang kerap dikeluarkan pencari keadilan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi serta kunjungan lapangan di Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  BPHN dan OMS telah melakukan diskusi bersama untuk menindaklanjuti temuan mengenai kebutuhan hukum kelompok rentan serta kunjungan lapangan untuk melakukan asesmen standar anggaran bantuan hukum.	<b>Aktif</b>

<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>		
Adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum (PBH) untuk kelompok rentan		
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
<b>Target B06:</b>  Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	<b>Capaian Target:</b>  BPHN telah melakukan diskusi peningkatan kapasitas PBH dengan OMS lain, yakni LBH APIK Papua dalam Kegiatan Pelatihan Paralegal Kampung Asei Kecil dan Kampung Nolokla Program Memperbaiki Akses Pada Layanan Hukum dan Sosial Bagi Perempuan (BERDAYA) di Papua tanggal 8 Februari 2023. BPHN juga telah membuat modul pelatihan paralegal bantuan hukum tanggal 10 April 2023 dan 7 Juni 2023.  Namun, diskusi belum dapat terlaksana antar BPHN dengan OMS pelaksana komitmen (IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia) karena OMS pelaksana masih sedang mengupayakan pendanaan dan menyusun rencana untuk kegiatan penguatan bantuan hukum.	<b>Nilai: 80%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Untuk target ini, BPHN telah melakukan ko-kreasi dengan beberapa PBH dan OMS, meskipun bukan dengan OMS pelaksana komitmen.	<b>Aktif</b>
<b>IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b>  Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas	<b>Capaian Target:</b>  Diskusi belum dapat terlaksana pada B06 karena OMS pelaksana komitmen masih mengupayakan pendanaan untuk melaksanakan Ukuran Keberhasilan 2 pada Komitmen 13.	<b>Nilai: 0%</b>

PBH bagi kelompok rentan	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Ko-kreasi belum terlaksana pada B06 karena target belum dijalankan.	N/A
<b>Tindak Lanjut B12:</b>  1. <b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Ko-kreasi antar BPHN dan OMS sudah berjalan dengan positif, di mana ada tindak lanjut konkret terhadap temuan kajian OMS mengenai “Legal Needs Survey” pada tahun 2022. Untuk periode berikutnya, BPHN dan OMS dapat melanjutkan diskusi-diskusi untuk persiapan bahan yang disampaikan dalam rapat PAK atau rapat penyusunan RUU Bantuan Hukum lainnya yang diikuti BPHN, serta melanjutkan pemetaan kebutuhan kelompok rentan dalam rangka perluasan anggaran bantuan hukum.  2. <b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> BPHN dan OMS pelaksana komitmen perlu melakukan diskusi terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan agar upaya penguatan dilakukan secara ko-kreasi. Jika OMS pelaksana komitmen masih ditengah mengupayakan penganggaran untuk menjalankan target capaian komitmen ini, inisiatif diskusi disarankan dapat dimulai dan difasilitasi oleh BPHN terlebih dahulu, atau dengan dukungan dari Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.		

## Komitmen 14

### Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Tersedianya peraturan turunan terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS yang disusun dengan pelibatan masyarakat sipil		
<b>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA dengan masukan dari masyarakat sipil	<b>Capaian Target:</b> Kementerian PPPA sudah melakukan penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> KemenPPPA sudah melaksanakan forum konsultasi publik yang mengundang beberapa masyarakat sipil, termasuk INFID. Ke depannya, ko-kreasi dapat dimaksimalkan agar mitra masyarakat sipil yang dilibatkan dalam diskusi juga bisa mendapatkan update mengenai perkembangan penyusunan peraturan turunan UPTD PPA. KemenPPPA juga dapat menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan OGI agar mitra pelaksana komitmen dapat saling meng-update kemajuan pelaksanaan komitmen dan mendiskusikan tindak lanjut ko-kreasi.	<b>Semi-Aktif</b>
<b>International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)</b>		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya pengumpulan data persepsi warga dan	<b>Capaian Target:</b> INFID telah menyusun Laporan Penelitian Needs Assessment: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasional	<b>Nilai: 100%</b>

operasionalisasi UU TPKS untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan <i>Policy Paper</i> mengenai konsepsi UPTD PPA dan peraturan turunannya.	
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  INFID telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), antara lain audiensi pada 2 Februari 2023 dan penyelenggaraan diskusi di Open Government Week 2023 untuk membahas substansi yang dapat mendukung peraturan turunan UPTD PPA. Namun, INFID melaporkan beberapa tantangan dalam memulai komunikasi awalan dengan Kementerian PPPA.	<b>Semi-aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>  Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA		
<b>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
<b>Target B06:</b>  Tidak ada target B06	<b>Capaian Target:</b>  Tidak ada target	<b>Nilai:</b>  <b>Tidak ada target</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>International NGO Forum on Indonesian Development</b>		
<b>Target B06:</b>  Tidak ada target B06	<b>Capaian Target:</b>  Tidak ada target	<b>Nilai:</b>  <b>Tidak ada target</b>

	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak ada target	Tidak ada target
<b>Ukuran keberhasilan 3:</b> Tersedianya peraturan turunan terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS		
<b>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</b>		
<b>Target B06:</b> 1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan PP (RPP) DBK  2. Terlaksananya konsultasi publik pembahasan RPP DBK	<b>Capaian Target:</b> 1. LPSK telah melakukan rangkaian rapat penyusunan dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku pemrakarsa RPP DBK pada bulan Februari sampai dengan Juni 2023, termasuk Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dengan LPSK sebagai anggota PAK untuk membahas RPP DBK TPKS pada tanggal 7 Juni 2023. 2. LPSK telah menjelaskan gambaran perkembangan pembahasan RPP DBK pada rapat yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA pada tanggal 20 Maret 2023, dan menyelenggarakan diskusi publik pada tanggal 27 Juni 2023.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> LPSK telah menjalankan berbagai upaya ko-kreasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bertemu dengan jaringan masyarakat sipil dalam rangka menjelaskan gambaran perkembangan pembahasan RPP DBK melalui pertemuan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 20 Maret 2023.</li> </ul>	<b>Aktif</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi sebagai narasumber dalam Open Government Week 2023 di diskusi panel yang mengangkat tema “Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS: Mendorong DBK dan UPTD PPA” pada 11 Mei 2023</li> <li>Menyelenggarakan diskusi publik dengan mengundang K/L terkait dan organisasi masyarakat sipil bertempat di Kantor LPSK pada tanggal 27 Juni 2023.</li> </ul>	
<b>Kementerian Hukum dan HAM</b>		
<b>Target B06:</b>  1. Tercantumnya usulan draf dalam kerangka regulasi perencanaan  2. Tersusunnya konsepsi draf yang telah teruji kelayakan konsepsi draf	<b>Capaian Target:</b>  1. Usulan RPP DBK TPKS telah dicantumkan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2023, dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemrakarsa. 2. Telah tersusun konsep RPP DBK TPKS per Juni 2023, dan telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) pada 7 Juni 2023.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Kementerian Hukum dan HAM belum melaksanakan ko-kreasi, karena tahap pembahasan RPP DBK masih di Rapat PAK, sehingga belum dapat melibatkan masyarakat. Namun, LPSK sebagai salah satu Lembaga yang terlibat dalam penyusunan RPP DBK TPKS telah melakukan diskusi dan penjangkaran masukan dari masyarakat sipil untuk mendukung muatan.	<b>N/A</b>
<b>Indonesia Judicial Research Society (IJRS), International NGO Forum on Indonesian Development</b>		

<p><b>Target B06:</b></p> <p>1. Terlaksananya penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK</p> <p>2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam konsultasi publik pembahasan RPP DBK</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>IJRS dan INFID telah melakukan penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK.</p> <p>IJRS dan INFID juga telah terlibat dalam Diskusi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (RPP DBK) pada 27 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta menyelenggarakan Side Event pada Open Government Week 2023 yang mengundang Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p>
	<p><b>Proses Ko-kreasi:</b></p> <p>OMS telah melakukan ko-kreasi dalam melaksanakan capaian, antara lain melalui partisipasi dalam diskusi pembahasan muatan untuk mendukung peraturan turunan mengenai DBK.</p>	<p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Tindak Lanjut B12:</b></p> <p>1. <b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Target B12 adalah tersedianya peraturan terkait UPTD PPA, dan tersedianya kajian mengenai UPTD PPA dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan UPTD PPA. Kementerian/Lembaga dan OMS perlu melakukan ko-kreasi yang dapat berbentuk diskusi, forum konsultasi, dan kegiatan lainnya di mana masyarakat sipil dapat menyampaikan masukan terhadap draf peraturan sebelum disahkan.</p> <p>2. <b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Target B12 adalah adanya desain awal untuk standar penerapan UPTD PPA yang sesuai dengan peraturan turunan mengenai UPTD PPA dan masukan dari masyarakat. Kementerian PPPA dan INFID disarankan untuk dapat melakukan ko-kreasi dari tahap awal pembuatan konsep standar penerapan UPTD PPA.</p>		



3. **Ukuran Keberhasilan 3:** Ko-kreasi antar LPSK dan OMS pelaksana komitmen sudah berjalan dengan positif, dan RPP DBK juga sudah melalui proses pembahasan PAK yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada B12, LPSK akan terlibat dalam koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam menyetujui RPP DBK. Saat menjalankan target tersebut, diharapkan LPSK dapat melanjutkan inisiatif untuk mengadakan diskusi-diskusi publik yang melibatkan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan terhadap RPP DBK. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas. Terakhir, OMS perlu menyelesaikan kajian terkait DBK untuk mendukung muatan dari RPP DBK dan turut dilibatkan dalam sosialisasi draf yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM.

## Komitmen 15

### Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Penyusunan data prioritas sektor SDA-LH yang partisipatif		
<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</b>		
<b>Target B06:</b>  Penyusunan daftar data prioritas di sektor lingkungan hidup dan SDA	<b>Capaian Target:</b>  Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Nilai:</b>  <b>0%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Pasif</b>
<b>Indonesian Center for Environmental Law, Publish What You Pay</b>		
<b>Target B06:</b>  1. Kajian urgensi dibentuknya gugus tematik satu data SDA & LH   2. Kajian data prioritas SDA & LH	<b>Capaian Target:</b>  Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b>  Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Pasif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor SDA-LH		

<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</b>		
<b>Target B06:</b> Penyusunan pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor LH-SDA	<b>Capaian Target:</b> Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Pasif</b>
<b>ICEL, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara</b>		
<b>Target B06:</b> Penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun antara CSO dengan masing-masing K/L/D untuk memetakan potensi dan tantangan pelaksanaan Satu Data Sektor LH-SDA	<b>Capaian Target:</b> Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	<b>Pasif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 3:</b> Penyelenggaraan forum satu data di sektor SDA-LH untuk persiapan data prioritas dan standar data, dan publikasi di portal data		
<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</b>		

<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b> Tidak ada target	<b>Nilai:</b> Tidak ada target
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>ICEL, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b> Tidak ada target	<b>Nilai:</b> Tidak ada target
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 4:</b> Penyajian data SDA-LH dalam portal Satu Data Indonesia		
<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b> Tidak ada target	<b>Nilai:</b> Tidak ada target
	<b>Proses Ko-kreasi:</b> Tidak ada target	<b>Tidak ada target</b>
<b>Tindak Lanjut B12:</b> Seluruh stakeholders tidak mengumpulkan data dukung		